



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebelum putusan akhir dalam perkara konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dalam perkara:

Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait.
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);
Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu RI.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

- [2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan Pihak Terkait serta Bawaslu RI telah memberikan keterangannya masing-masing;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;

- [3.2]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI serta mengesahkan dan memeriksa alat bukti Termohon, alat bukti Pihak Terkait, dan alat bukti Bawaslu RI;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan **perkara yang tidak dilanjutkan** ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom **(6) ALASAN HUKUM** masing-masing perkara sebagaimana tertera dalam Putusan ini yang sekaligus merupakan alasan Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.4]** perkara yang tidak dilanjutkan adalah sebagai berikut:

| NO. | NOMOR PERKARA | PEMOHON | PROVINSI | DAPIL | ALASAN HUKUM |
|-----|---|--|---------------|--------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Jawa Timur | Jatim I (DPR RI) | Posita dan petitum tidak bersesuaian. |
| 2. | 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Jawa Timur | Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) | Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan. |
| 3. | 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Kebangkitan Bangsa | Jawa Timur | Malang 6 (DPRD Kabupaten) | Permohonan ditarik |
| 4. | 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | Jawa Timur | Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) | Terdapat pertentangan dalam Petitum |
| | | | | Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) | Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---|--|
| 5. | 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Aceh | Aceh | Aceh 4 (DPRA Provinsi) | Terdapat pertentangan dalam Petitum |
| 6. | 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Demokrat | Aceh | Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) | Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 |
| 7. | 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Aceh | --- | Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil |
| 8. | 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | DKI Jakarta | DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) | Permohonan ditarik |
| 9. | 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Sumatera Utara | Sumut II (DPR RI) | Permohonan ditarik |
| 10. | 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Sumatera Utara | Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Langkat 1 (DPRD Kabupaten) | Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan. |
| | | | | Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tapanuli | Permohonan ditarik |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|---|
| | | | | Selatan 2 (DPRD Kabupaten) | |
| 11. | 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | Sumatera Utara | Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) | Petitum tidak bersesuaian |
| 12. | 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Kebangkitan Bangsa | Sumatera Utara | Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 |
| 13. | 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Demokrat | Papua Barat | Papua Barat (DPR RI) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| | | | | Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| | | | | Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tambrau 1 (DPRD) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------|----------------------------------|--|
| | | | | Kabupaten) | |
| | | | | Tambrau 3 (DPRD Kabupaten) | Petitem tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| 14. | 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | Riau | Siak 3 (DPRD Kabupaten) | Permohonan ditarik |

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara-perkara tersebut dalam Paragraf **[3.5]**, sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana amar di bawah ini;

[3.7] Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

| NO. | NOMOR PERKARA | PEMOHON | PROVINSI | DAPIL | ALASAN HUKUM |
|-----|---|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Gerakan Indonesia | Jawa Timur | Jatim I (DPR RI) | Posita dan petitum tidak bersesuaian. |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | | Raya | | | |
| 2. | 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Jawa Timur | Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) | Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan. |
| 3. | 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Kebangkitan Bangsa | Jawa Timur | Malang 6 (DPRD Kabupaten) | Permohonan ditarik |
| 4. | 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | Jawa Timur | Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) | Terdapat pertentangan dalam Petitum |
| | | | | Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) | Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto |
| 5. | 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Aceh | Aceh | Aceh 4 (DPRA Provinsi) | Terdapat pertentangan dalam Petitum |
| 6. | 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Demokrat | Aceh | Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) | Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 |
| 7. | 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Aceh | --- | Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|--|
| 8. | 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | DKI Jakarta | DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) | Permohonan ditarik |
| 9. | 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Sumatera Utara | Sumut II (DPR RI) | Permohonan ditarik |
| 10. | 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Golongan Karya | Sumatera Utara | Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Langkat 1 (DPRD Kabupaten) | Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan. |
| | | | | Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) | Permohonan ditarik |
| 11. | 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | Sumatera Utara | Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) | Petitum tidak bersesuaian |
| 12. | 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Kebangkitan Bangsa | Sumatera Utara | Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 |
| 13. | 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Demokrat | Papua Barat | Papua Barat (DPR RI) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| | | | | Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| | | | | Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tambrau 1 (DPRD Kabupaten) | Posita dan petitum tidak bersesuaian |
| | | | | Tambrau 3 (DPRD Kabupaten) | Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 |
| 14. | 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 | Partai Nasdem | Riau | Siak 3 (DPRD Kabupaten) | Permohonan ditarik |

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.53 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia, Romi Sundara, Luthfi Widagdo Eddyono, Haifa Arief Lubis, Nurlidya Stephanny Hikmah, Mardian Wibowo, Yunita Nurwulantari, Rahmadiani Putri Nilasari, Rio Tri Juli Putranto, Nallom Kurniawan, dan Riani Anggraini, sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia

ttd

Romi Sundara

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono

ttd

Haifa Arief Lubis

ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd

Mardian Wibowo

ttd

Yunita Nurwulantari

ttd

Rahmadiani Putri Nilasari

ttd

Rio Tri Juli Putranto

ttd

Nallom Kurniawan

ttd

Riani Anggraini



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.